

BAB V

KESIMPULAN

Penelitian ini telah menjelaskan bahwa isu strategis dapat membuat kolaborasi aktor-aktor baru dalam dunia Hubungan Internasional yang menyangkut peran bantuan asing dengan melibatkan aktor negara dan aktor non negara. Dewasa ini banyak kajian yang membahas keterlibatan negara maju dalam memberikan bantuan asing kepada negara berkembang dalam agenda politik internasional. Tujuan pemberian bantuan asing ini biasanya untuk menghasilkan progres positif bagi pembangunan nasional di negara-negara berkembang yang membutuhkan serta dapat mempererat hubungan antara negara pemberi dengan negara penerima. Hal ini mengartikan bahwa secara tidak langsung sebuah negara membutuhkan aktor lain dalam melakukan pembangunan di negaranya karena ketidakmampuan menghadapi masalah pembangunan yang cukup kompleks, salah satunya melalui pemberian bantuan asing oleh negara yang lebih maju secara ekonomi kepada negara berkembang sehingga dapat memberikan dampak positif pada kemajuan negara berkembang tersebut sebagai penerima bantuan.

Aktor Hubungan Internasional yang paling berpengaruh dalam penelitian ini adalah Pemerintah Jepang dan salah satu lembaga non profit di Indonesia dalam mengatasi masalah keamanan ekonomi yang terjadi di Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung. Skripsi ini mengambil tema kajian non-tradisional yang lebih menitikberatkan pada isu keamanan ekonomi sebagai bagian dari konsep keamanan manusia. Saat ini kajian dalam isu keamanan sudah semakin berkembang dan tidak relevan lagi untuk berfokus pada negara dan teritorialnya serta penggunaan *hard power* (militer) sebagai instrumen dalam menjaga stabilitas karena isu keamanan sudah meluas ke sektor individu dan telah masuk ke aspek politik, pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Sehingga konsep keamanan tradisional

yang dilahirkan oleh pemikiran kaum realis kini sudah mulai usang dan belum bisa memberikan jaminan keamanan bagi bangsa suatu negara. Pada tahun 1994 UNDP mengeluarkan laporan tentang keamanan manusia yang menyebutkan bahwa terdapat tujuh dimensi yang akan mengancam keberlangsungan hidup manusia dimana salah satunya adalah keamanan ekonomi yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

Menurut UNDP keamanan ekonomi merupakan kondisi yang mengharuskan pemasukan tetap layak untuk setiap orang. Keamanan ekonomi membutuhkan penghasilan dasar yang terjamin biasanya dari pekerjaan yang produktif dan menguntungkan, atau dalam upaya terakhir dari beberapa jaring pengaman yang dibiayai publik. Tetapi hanya sekitar seperempat penduduk dunia yang saat ini dapat secara ekonomi aman dalam pengertian ini. Sementara masalah keamanan ekonomi di negara berkembang lebih mengkhawatirkan dibanding negara maju. Berdasarkan penelitian yang dikeluarkan oleh JICA Research Institute bahwa keamanan ekonomi (kebebasan dari keinginan) adalah masalah keamanan manusia yang paling penting di Indonesia seperti kesenjangan pendapatan, ketimpangan pendapatan, atau distribusi kesejahteraan / sumber daya yang tidak merata.

Dalam dunia Internasional peran Jepang telah dianggap sebagai kontributor utama untuk pengarusutamaan intelektual dari konsep dan implementasi konsep keamanan manusia. Salah satunya melalui “Piagam *Official Development Assistance* (ODA) 2003” yang ditawarkan pemerintah Jepang kepada negara-negara berkembang dalam mengatasi masalah keamanan manusia. Pada dasarnya, ODA Jepang diberikan melalui tiga jenis, yaitu pinjaman YEN, bantuan hibah dan kerjasama teknik. Namun penelitian ini hanya berfokus pada bantuan hibah dengan salah satu turunannya yaitu “Grant Assistance for Grassroots Human Security Project” (GGP).

Pada dasarnya ODA Jepang diberikan melalui tiga jenis bantuan, yaitu pinjaman YEN, bantuan hibah dan kerjasama

teknik. Namun penelitian ini hanya berfokus pada bantuan hibah untuk masyarakat di tingkat akar rumput. Secara resmi bantuan hibah tersebut bernama “*Grant Assistance for Grassroots Human Security Project*” (GGP). Program GGP pertama kali diperkenalkan oleh pemerintah Jepang pada tahun 1989 dan sudah tersebar ke berbagai negara-negara berkembang dalam bentuk bantuan keuangan. Dalam pemberian skema GGP, pemerintah Jepang mengambil dimensi tambahan “Keamanan Manusia” untuk mengatasi kebutuhan yang muncul dari negara-negara berkembang atau negara-negara pasca konflik dalam mempromosikan proses pembangunan perdamaian. Landasan pemberian bantuan ini muncul dari proyek pembangunan yang diusulkan oleh entitas seperti lembaga non profit dan otoritas pemerintah daerah di negara penerima. Oleh sebab itu, pemerintah Jepang melalui Kedutaan Besarnya di negara-negara penerima memiliki skema kerjasama dengan entitas tersebut guna mengumpulkan informasi dan menganalisanya ke dalam bentuk data valid agar bantuan yang diberikan bisa sesuai dengan kebutuhan di negara penerima.

GGP mulai masuk ke Indonesia pada tahun 1997 sebagai bentuk dukungan Jepang kepada Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi pada saat itu. Meskipun pertumbuhan ekonomi di Indonesia cukup stabil, namun Indonesia dituntut harus bisa mempertahankan kestabilan tersebut baik jangka menengah maupun jangka panjang. Oleh karena itu, melalui program GGP kerjasama antara pemerintah Jepang melalui Kedubesnya di Indonesia dengan lembaga non profit di Indonesia diharapkan dapat berkontribusi untuk mengatasi berbagai isu pembangunan pada masyarakat di tingkat akar rumput.

Pada tahun anggaran 2017 Jepang mengeluarkan bantuan hibah akar rumput sebesar Rp 6,353 miliar untuk 7 proyek yang tersebar di Indonesia dengan latar belakang isu yang berbeda. Namun penelitian ini hanya berfokus pada salah satu proyek yang bernama “*The Project for Supporting Fishermen in Belitung Island, Bangka Belitung Province.*” Secara khusus, lokasi sasaran dalam proyek ini diperuntukkan bagi 6 Desa

pesisir di Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung.

Proyek ini merupakan usulan dari perkumpulan Karya Muda Belitung (KMB) yang berinisiatif untuk mengatasi masalah keamanan ekonomi terhadap masyarakat pesisir yang memiliki industri ikan asin dan olahan kering lainnya di Kecamatan Sijuk. Ketika musim hujan yang sulit diprediksi tiba, masyarakat pesisir di Kecamatan Sijuk harus dihadapkan dengan keadaan yang sulit, mengingat produksi ikan asin dan olahan kering lainnya merupakan sumber pendapatan mereka sehari-hari. Metode industri yang mereka lakukan masih bersifat tradisional yaitu proses produksi dalam penjemuran produk harus menunggu waktu 2-3 hari itupun jika tidak terkendala cuaca mengingat curah hujan di Belitung cukup tinggi. Bahkan pernah ada satu desa yang mengalami kerugian sebesar 1 miliar pada tahun 2017 akibat curah hujan yang panjang mengganggu produksi mereka padahal daerah tersebut merupakan salah satu sentra ikan asin terbesar di Indonesia. Selain itu, metode penjemuran di area terbuka yang berbatasan langsung dengan tanah rawan akan bakteri akibat kontaminasi pasir, debu dan tanah. Selebihnya masalah lain yaitu ketika *demand* produk dipasaran tinggi namun kapasitas produsen dalam mengolah masih terbatas sehingga *supply* produk menjadi rendah.

Peran *Grant Assistance for Grassroots Human Security Project* (GGP) dalam mengatasi masalah keamanan ekonomi terhadap masyarakat pesisir yang ada di Kecamatan Sijuk di implementasikan ke dalam dua bentuk kerjasama. *Pertama*, Kedubes Jepang memberikan dana hibah sebesar Rp 717,000,000,- kepada Karya Muda Belitung untuk pengadaan 10 mesin pengering makanan (food drying machine) berkapasitas besar kepada 6 desa sasaran di Kecamatan Sijuk. *Kedua*, skema GGP yang ditawarkan oleh Kedubes Jepang mengharuskan Karya Muda Belitung untuk membuat program pemberdayaan bagi masyarakat nelayan berupa kelas aplikatif di lingkungan produksi agar bantuan yang diberikan bisa

berjalan efektif, berkelanjutan serta memberikan edukasi kepada mereka dalam merancang, mengerjakan, mengelola dan mempertanggungjawabkan bantuan yang sudah diberikan. Dalam proses implementasinya, Karya Muda Belitung juga harus dihadapkan berbagai masalah dan tantangan yang ada di lapangan mengingat eksekusi proyek tidak semudah dalam perencanaan awal. KMB harus berhadapan dengan masalah dan tantangan seperti kualitas SDM desa yang masih rendah, jarak teknisi mesin dengan daerah sasaran yang sangat jauh dan dana hibah yang hanya terbatas untuk pengadaan mesin pengering saja tanpa mencakup biaya perjalanan implementasi proyek.

Hasil yang diperoleh atas proyek ini sangat beragam, jadi ukuran berhasil proyek tidak bisa difokuskan pada satu jenis produk saja mengingat potensi sumber daya yang dimiliki oleh setiap desa sangat beragam. Namun ada tiga dampak nyata setelah Karya muda Belitung melakukan kerjasama GGP dengan Kedubes Jepang di Indonesia. *Pertama*, masyarakat pesisir memiliki alternatif industri yang lebih modern tanpa terkendala cuaca dan kebersihan. *Kedua*, Peningkatan kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan. *Ketiga*, masyarakat pesisir yang bermata pencaharian sebagai produsen ikan asin dan produk olahan lainnya mendapatkan akses yang mudah untuk menstabilkan pendapatan mereka dan lebih layak daripada sebelumnya sehingga dapat meningkatkan keamanan ekonomi mereka.